



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kebut Belanjakan Anggaran Rp 37 Triliun

Hanya tersisa waktu 2,5 bulan.

Linda Hairani

linda.hairani@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta akan mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu yang tersisa hingga akhir tahun ini. "Belanja barang dan jasa kami maksimalkan," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, kemarin.

Saefullah menerangkan, belanja barang dan jasa akan digenjut karena serapan anggaran DKI sejauh ini baru 48 persen dari total Rp 71,16 triliun. Artinya, sekitar Rp 37 triliun anggaran akan dibelanjakan sampai tahun anggaran berakhir pada 15 Desember mendatang.

Rendahnya serapan anggaran menjadi pembahasan khusus dalam rapat di Sekretariat Daerah DKI kemarin. Saefullah memanggil satuan kerja perangkat daerah yang serapan anggarannya masih rendah. Hadir dalam rapat itu, perwakilan Dinas Pendidikan; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Bina Marga; dan Dinas Kehutanan.

Saefullah menjelaskan, sekitar 12 persen rencana pengadaan barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 belum dilelang. Contohnya, pengadaan furnitur untuk gedung sekolah dan kantor pemerintahan Kepulauan Seribu yang baru diperbaiki. Menurut dia, belanja furnitur bisa mengerek serapan

anggaran lantaran prosesnya lebih cepat dibanding proyek konstruksi.

Saefullah meminta dinas yang melaksanakan proyek konstruksi lebih aktif menagih penyelesaian pekerjaan kepada para kontraktor. Dia juga meminta dinas mempercepat pembayaran proyek yang sudah terlaksana. Contohnya, Dinas Pendidikan yang merehab 100 gedung sekolah di lima wilayah Jakarta. Pengerjaan rehab fisik sekolah sudah mencapai 80 persen, tapi realisasi serapan anggarannya baru 0,22 persen. "Rendah karena belum ada pembayaran dari Dinas," kata dia.

Serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI juga menjadi salah satu yang terendah. Hingga kemarin, realisasinya baru 15,8 persen. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Melly Budiasuti, mengatakan masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama serapan anggaran di instansinya. Dari alokasi Rp 2,7 triliun, anggaran pembelian lahan mencapai Rp 1,6 triliun. Adapun serapannya baru Rp 180 miliar. Di luar lahan, menurut Melly, kendala waktu

pelaksanaan juga membuat batalnya pembangunan rumah susun di tiga lokasi.

Saefullah memberikan juga "ponton merah" atas penyerapan anggaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Sejumlah proyek pembangunan kantor lurah dan camat di wilayah itu gagal terlaksana. "Yang di Jakarta Selatan ini rapornya jelek sekali," kata dia.

Dari enam proyek kantor dan rumah dinas di Jakarta Selatan, menurut Saefullah, lima di antaranya gagal dibangun. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan lelang. Pemerintah Kota Jakarta Selatan baru menyerap 0,57 persen dari total anggaran Rp 34,44 miliar. "Padahal APBD sudah disahkan akhir tahun lalu, Januari sudah bisa lelang," ujar Saefullah.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengatakan kegagalan lelang terjadi lantaran dinas tak memenuhi sejumlah persyaratan, seperti rincian kegiatan dan indikator kinerja, studi kelayakan, *detailed engineering design*, serta kesiapan lokasi atau lahan.

Perencanaar yang tak matang, menurut Blessmiyanda, juga terlihat dari survei pasar yang baru dilakukan pada awal tahun anggaran. "Sebaiknya semua kriteria persiapan itu dilakukan setahun sebelum program dianggarkan," kata dia.

● LAIN DUNIA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Kebut Belanjakan Anggaran Rp 37 Triliun

Ditunda ke Tahun Depan

Dinas Kesehatan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunda rehabilitasi puskesmas dan rumah susun dengan alasan keterbatasan waktu. Total nilai proyeknya sekitar Rp 820,05 miliar. Di Jakarta Selatan, pembangunan kantor-kantor pemerintahan juga dibatalkan karena gagal kreatif.

Berikut ini daftar program dalam APBD DKI 2018 yang dibatalkan:

■ DINAS KESEHATAN

1. Jakarta Pusat Rp 32,59 miliar

- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kecamatan Gambrin Rp 14,5 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Karet Tengsin Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Serdang Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Kapuk Muara Rp 6,03 miliar

2. Jakarta Barat Rp 6,03 miliar

- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Duri Utara Rp 6,03 miliar

3. Jakarta Selatan Rp 24,12 miliar

- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara I Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Gandaria Utara II Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Duren Tiga Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu Rp 6,03 miliar

4. Jakarta Timur Rp 42,21 miliar

- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Ciracas Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Kayu Putih Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Setu Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Sari Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon Pala Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Pulo Gebang Rp 6,03 miliar
- Rehabilitasi Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester Rp 6,03 miliar

5. Penyediaan Jasa Manajemen Konstruksi Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas di DKI Jakarta Rp 2,7 miliar

■ DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

1. Revitalisasi Rumah Susun Karsang Anyar, Jakarta Pusat Rp 162,8 miliar
2. Pembangunan Rumah Susun Jalan Inspeksi Ujung Menteng, Jakarta Timur, Rp 361,4 miliar
3. Pembangunan Rumah Susun Pusat Industri, Kedi Putogabung, Jakarta Timur, Rp 186,2 miliar

■ PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN

1. Rehabilitasi total rumah dinas Lurah Kalibata
2. Pembangunan rumah dinas Camat Pesanggrahan
3. Pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan
4. Rehabilitasi total rumah dinas Camat Cilandak
5. Renovasi bangunan untuk Kelurahan Kuningan Timur

SUMBER: WAWANCARA, APBD DKI JAKARTA 2018

● LINDA HARANI